

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

- Pada Mei 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Kabupaten Maluku Tengah sebesar 1,01 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 103,07
- Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,23 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,71 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,54 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,84 persen; kelompok kesehatan sebesar 9,06 persen; kelompok transportasi sebesar 0,88 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,95 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 4,09 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 4,69 persen.
- Tingkat inflasi month to month (m-to-m) Kabupaten Maluku Tengah bulan Mei 2024 sebesar 0,74 persen dan tingkat deflasi year to date (y-to-d) Kabupaten Maluku Tengah bulan Mei 2024 sebesar 2,99 persen.
- **Perkembangan harga**

Perkembangan harga berbagai komoditas pada Mei 2024 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS Kabupaten Maluku Tengah, pada Mei 2024 terjadi inflasi y-on-y sebesar 1,01 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 102,04 pada Mei 2023 menjadi 103,07 pada Mei 2024. Tingkat inflasi m-to-m sebesar 0,74 persen dan tingkat deflasi y-to-d sebesar 2,99 persen.

- **Risiko ke Depan**

Risiko ke depan yang mungkin di hadapi oleh Kabupaten Maluku Tengah adalah risiko terhadap musim hujan dan badai, yang akan mengganggu distribusi barang kebutuhan pokok dan mempengaruhi permintaan masyarakat, yang pada akhirnya akan berdampak terhadap rendahnya permintaan masyarakat, sehingga menyebabkan kondisi harga barang kebutuhan pokok akan terganggu.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

1. Permasalah utama pengendalian inflasi ada pada rendahnya konektivitas jaringan distribusi pangan. Rendahnya konektivitas yang dimaksud adalah permasalahan konektivitas terutama dihadapi oleh daerah-daerah di Timur yang memiliki tingkat ketergantungan pasokan antar daerah yang cukup tinggi.
2. Kesenjangan Informasi. Kesenjangan informasi atau assymmetric information antar pelaku di tengah panjangnya rantai distribusi menyebabkan tidak efisiennya harga di pasar.
3. Distorsi Struktur Pasar. distorsi struktur pasar ditimbulkan akibat adanya beberapa komoditas strategis yang terdistorsi menyebabkan adanya kekakuan dalam perilaku pembentukan harga
4. Produktivitas Pangan. Dimana peningkatan produktivitas pangan di tengah kendala iklim menjadi tantangan yang dihadapi terutama di Jawa sebagai basis produksi pangan

nasional.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah terus berkoordinasi, bersinergi dan berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku Tengah, OPD terkait, stakeholders, maupun lembaga dan instansi vertikal lainnya. Dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah. Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah telah memiliki program unggulan yang bekerjasama dengan seluruh instansi, lembaga dan stakeholders terkait lainnya yang tertuang dalam 9 langkah kongkrit pengendalian inflasi daerah

1	Melakukan pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia.	
	1)	Pemantauan Harga di Pasar Binaya masohi setiap hari
	2)	Pemantauan Harga pada Pedagang Eceran setiap hari
	3)	Pemantauan Stok Barang di Agen, Distributor, Minimarket setiap bulan
	4)	Pelaporan Harga Barang Pokok setiap hari
2	Melaksanakan rapat teknis Tim Pengendali Inflasi Daerah	
	1)	Rapat Inflasi dengan Pemerintah Pusat setiap hari senin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah Yang dipimpin Menteri Dalam Negeri, diikuti seluruh Kepala Daerah Se-Indonesia, 18 Maret 2024
	2)	Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah Yang dipimpin Menteri Dalam Negeri, diikuti seluruh Kepala Daerah Se-Indonesia, 25 Maret 2024
	3)	Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah Yang dipimpin Menteri Dalam Negeri, diikuti seluruh Kepala Daerah Se-Indonesia, 01, 22, 29 April 2024
	4)	Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah Yang dipimpin Menteri Dalam Negeri, diikuti seluruh Kepala Daerah Se-Indonesia, 06, 13 20, 27 Mei 2024
	5)	Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah Yang dipimpin Menteri Dalam Negeri, diikuti seluruh Kepala Daerah Se-Indonesia, 04 Juni 2024
	6)	Rapat inflasi setiap hari Senin minggu kedua bulan berjalan.
	7)	Rapat Koordinasi pengendalian Inflasi Daerah dengan Pemerintah Provinsi Maluku pada tanggal 22 Mei dan 05 Juni 2024
	8)	
3	Menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting	
	1)	Pengawasan distribusi barang kebutuhan pokok yang oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kejaksaan dan Kepolisian. Kerjasama antar Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Probolinggo , Kesepakatan Bersama ditandatangani dengan Perjanjian Kerjasama Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Maluku Tengah.
	2)	Rapat Koordinasi TPID dan Satgas Ketahanan Pangan, selain dihadiri oleh OPD terkait, para pelaku usaha juga dihadirkan.
	3)	Penegembangan Tol Laut Distribusi bahan pangan beras dan aneka sayuran, cabai dan tomat di pasar dhuafa dalam rangka pengendalian inflasi dan penurunan angka kemiskinan di Kota Masohi. Barang yang didistribusi adalah Cabai Keriting 300 Kg, Cabai Rawit 75 Kg, Beras Kobisonta 1 Ton. Panen Bawang Merah di Kecamatan Leihitu Desa Telaga Kodok pada tanggal 29 April 2024 Bangsal Pasca Panen Merupakan tempat penyimpanan hasil pasca panen dan tempat pengolahan hasil bawang merah yang bertempat di Kecamatan Leihitu desa Telaga Kodok, yang akan di pasarkan di Pasar dan Supermarket pada tanggal 24 April 2024.
	4)	
	5)	
	6)	Rumah Pengering bawang (Instore Dryer) merupakan rumah penyimpanan Hasil panen bawang merah Petani untuk di jadikan benih yang bertempat di Kecamatan Leihitu desa Telaga Kodok pada tanggal 24 April 2024.
	7)	Digital farming merupakan alat pertanian moderen yang dikendalikan melalui aplikasi digital misalnya penyiraman tanaman pemupukan , sensor tanah dan mendeteksi unsur hara tanah (kelembabahan tanah dan lain lain) yang bertempat di Kecamatan Leihitu desa Telaga Kodok pada tanggal 24 April 2024
	8)	
	9)	
4	Melaksanakan Pencanaan Gerakan Menanam	

	1)	Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2024, pemerintah Desa mengalokasikan anggaran ketahanan pangan Rp. 34.792.186.524 Miliar yang tersebar di 17 Kecamatan.
	2)	Pencanangan Gerakan Tanam Cabai dan Penghijauan di Pekarangan Sekolah dilaksanakan secara serempak Pada Sekolah di seluruh Kecamatan, anakan cabai sebanyak 7.090, Sayur 3.520 pada tanggal 27 April 2024.
	3)	Gerakan Tanam Cabai di Pekarangan Kantor Satpol PP Maluku Tengah sebanyak 150 anakan cabai pada tanggal 24 April 2024
	4)	Gerakan Tanam padi Sawah (MT1) Kolaborasi antara TNI, Penyuluh Pertanian Lapangan dan Petani seluas 250 Ha di Kecamatan Seram Utara Timur Seti desa Loping Mulyo dalam Rangka Peningkatan Ketahanan Pangan dan Pengendalian Inflasi Daerah pada tanggal 27 April 2024
	5)	Gerakan Tanamn Budidaya Bawang Merah biji seluas 4 ha oleh kelompok masyarakat dan Mahasiswa Unpatti Ambon dalam rangka pengendalian Inflasi Daerah dan upaya peningkatan pendapatan Petani pada tanggal 14 Mei 2024
	6)	
	7)	Pencanangan Gerakan Tanam Cabai dan Penghijauan di Pekarangan Sekolah dilaksanakan secara serempak Pada Sekolah di Kecamatan Saparua , anakan cabai sebanyak 100 anakan pada tanggal 14 Mei 2024.
	8)	Gerakan Tanam Cabai Menyongsong hari Pattimura dilaksanakan oleh ASN Kecamatan Saparua dan Penyuluh Peretanian Lapangan dalam rangka pengendalian infalasi Daerah di Kabupaten Maluku Tengah Seluas 1 Ha Pada tanggal 14 Mei 2024
	9)	Gerakan Tanam Padi di Kecamatan Seram Utara Timur Seti dengan luas tanam 100 Ha MT1 dalam rangka peningkatan ketahanan pangan dan pengendalian Inflasi Daerah pada tanggal 11 Mei 2024
	10)	Gerakan tanam cabai sebanyak 275 anakan, 1 ha, di Kecamatan Pulau Haruku pada tanggal 22 Mei 2024
		Gerakan tanam cabai sebanyak 150 anakan, 1/4 ha, di Kecamatan Salahutu pada tanggal 27 Mei 2024
5		Melaksanakan operasi pasar murah
	1)	
	2)	
	3)	Gerakan Pangan Murah dilaksanakan setiap hari Senin dan Selasa Minggu Berjalan yang dilaksanakan di Gerai TPID dan Pasar Ramah Kaum Dhuafa Maluku Tengah.
	4)	Pasar murah digelar Pemerintah Kabupaten untuk menekan angka kenaikan inflasi, serta untuk memulihkan perekonomian Masyarakat yang dilaksanakan di Kecamatan Seram Utara pada tanggal 27-30 Maret 2024, Kecamatan Kota Masohi pada tanggal 2-3 April 2024 serta Pasar Murah Kelili
	5)	Pembukaan Gearakan Pangan Murah di Pasar Binaya Masohi pada tanggal 01 April 2024
	6)	Gerakan Operasi Pasar Penjualan Minyak Tanah dan sembakok di Gerai TPID & Pasar Ramah Kaum Dhuafa sesuai HET Rp 3.600/ liter pada tanggal 08 April 2024
	7)	Kegiatan Pasar Rakyat dan Bazar yang diselenggarakan oleh Kodim 1502 Masohi dan Pemda Maluku Tengah Dalam Rangka Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1445 H/2024 M pada tanggal 02 April 2024.
	8)	Operasi Pasar Subsidi Ikan dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah yang dilaksankan setiap hari senin minggu berjalan
		Gerakan Pangan Murah bagi Pegawai Non ASN Lingkup Pemda Maluku Tengah pada tanggal 03 April 2024.
		Gerakan Pangan Murah yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2024.
6		Melaksanakan sidak kepasar dan distributor agar tidak menahan barang.
	1)	Pada tanggal 06 Mei 2024, Penjabat Bupati bersama pimpinan OPD terkait melakukan sidak komoditi bahan pokok di Pasar Binaya Masohi. Pada tanggal 14 Mei 2024,
	2)	Penjabat Bupati bersama pimpinan OPD terkait melakukan sidak komoditi bahan pokok di Pasar Binaya Masohi
	3)	Pelaksanaan Sidak Pasar Setiap Minggu
		Koordinasi dan Kerja sama dengan daerah lain dan perusahaan swasta
7	1.	Kerjasama antar Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
	2.	Penjajakan Kerjasama Antar Daerah Komoditas Perdagangan dengan Kabupaten Sidrap, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan Kota Makassar.
	3.	MoU Kerjasama Antar Daerah Komoditas Perdagangan dengan Kabupaten Maluku Tenggara
8		Memberikan bantuan transportasi dari APBD.
	1)	Bantuan Subsidi transportasi sebagai bagian dari belanja perlindungan sosial sebesar Rp. 328.000.000
9		Alokasi BTT untuk Mendukung Pengendalian Inflasi Rp. 4.000.000.000.

Pengendalian inflasi menjadi sangat penting untuk menjadi isu daerah yang diharapkan dapat mengatasi dampak yang terjadi karena adanya inflasi salah satu inflasi yang perlu diwaspadai dan dikendalikan yaitu, inflasi volatile food (pangan bergejolak). dalam mengatasi inflasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah menerapkan strategi 4K yaitu memastikan Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi rantai pasok dan Komunikasi yang efektif.

Nomor Strategi	Program/Kegiatan	OPD Pengampu
1	KETERJANGKAUAN HARGA	
	1. Melaksanakan Operasi Pasar Murah/Gerakan Pangan Murah sebanyak 6 kali menjelang Nataru 2023 dan sebanyak 10 kali dari bulan Januari sampai dengan Minggu I bulan Maret 2024, dan Pasar Keliling pada 7 Kecamatan	Dinas Ketahanan Pangan
	2. Membentuk Gerai TPID dan Pasar Ramah Duafa di dalam komplek pasar Binaya Masohi. Gerai TPID dan Pasar Ramah Duafa ini digunakan sebagai tempat menjual pangan pokok dengan harga yang lebih murah juga sebagai tempat kaum duafa mendapatkan harga bahan pokok dengan harga 20 persen dari harga barang yang dijual. Kegiatan Pasar Ramah Duafa bagi kaum duafa dengan dana APBD Kabupaten untuk kecamatan Kota Masohi dan APBD Desa untuk 17 Kecamatan yang lain.	TPID
	3. Subsidi harga barang	Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Ketahanan Pangan
	4. Pasar Ramah Duafa	Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Nomor Strategi	Program/Kegiatan	OPD Pengampu	
2	KETERSEDIAAN PASOKAN	a. Panen padi seluas 2.091 ha dengan total produksi padi sebanyak 5.269 ton. Dengan produksi sebanyak ini mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Maluku Tengah selama 59 hari kedepan yaitu bulan Maret sampai dengan bulan April 2024. Konsumsi masyarakat kabupaten Maluku Tengah per hari sebanyak 88,9 ton.	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		b. Pasokan beras lain terutama beras SPHP, Gula konsumsi dan Minyak Kita Melalui kerjasama dengan BULOG dan ID Food lainnya.	Bulog, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		c. Memfasilitasi 118 pedagang sebagai mitra Bulog	Dinas Ketahanan Pangan
		d. Panen cabe rawit di Kecamatan Amahai dan cabe keriting di kecamatan Seram Utara Timur Seti	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		e. Panen Bawang Merah seluas 10 ha di dusun Wailapia Kecamatan Leihitu Barat dengan total panen sebanyak 5 ton	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		f. Pengembangan cabe holo beserta sarana pendukungnya di 14 kecamatan, telah panen dan produksi terbanyak ada di Dusun Haruo Negeri Rutah kecamatan Amahai;	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		g. Gerakan menanam padi, telah panen raya di bulan Februari 2024;	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		h. Gerakan menanam bawang merah di Kecamatan Leihitu Barat di Dusun Wailapia;	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		i. Gerakan menanam cabe di pekarangan kantor, pekarangan sekolah dan pekarangan rumah masyarakat sesuai Surat Edaran Bupati Maluku Tengah Nomor 526/06/SE/2024 tentang Gerakan Menanan Cabe di Pekarangan yang telah dilaunching pada tanggal 2 Februari 2024;	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		j. Gerakan Menanam Cabe secara serentak Nasional oleh TP PKK Pusat dan daerah, dan di Kabupaten Maluku Tengah dilaksanakan oleh TP PKK Kabupaten di lokasi Kebun Bimbingan Tanaman Pangan dan Hortikultura Negeri Haruru Kecamatan Amahai pada tanggal 4 Maret 2024.	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, TP PKK Kabupaten dan Kecamatan

Nomor Strategi	Program/Kegiatan	OPD Pengampu
3	a. Subsidi biaya transportasi dari APBD	Dinas Perhubungan Sekretariat Daerah,
	b. Kerjasama antar Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Sekretariat Daerah,
	c. Kerjasama dengan Kota Ambon	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	d. Penjajakan Kerjasama dengan Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Enrekang dan Kota Makassar	Sekretariat Daerah, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	e. Kerjasama dengan Bulog	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	f. Kerjasama dengan Id Food	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	g. Kerjasama RMP dan RMU di Kecamatan Seram Utara.	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
4	a. Melakukan High Level Meeting	TPID
	b. Rapat Koordinasi dengan TPID Pusat setiap hari Senin	TPID
	c. Rapat Koordinasi dengan TPID Provinsi Maluku	TPID
	d. Rapat Koordinasi TPID Kabupaten setiap Senin	TPID

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di Maluku Tengah bersifat komprehensif dan dilakukan secara teratur guna memastikan bahwa upaya untuk mengendalikan inflasi tetap relevan dan efektif.

1. Rendahnya konektivitas jaringan distribusi pangan. Rendahnya konektivitas yang dimaksud adalah permasalahan konektivitas terutama dihadapi oleh daerah-daerah Timur yang memiliki tingkat ketergantungan pasokan antar daerah yang cukup tinggi. Diperlukan Langkah untuk memastikan jalur distribusi menjadi lancar antara lain .
2. Meningkatkan konektivitas transportasi, distribusi barang dari produsen ke konsumen dapat menjadi lebih efisien. Hal ini dapat mengurangi biaya logistik dan penundaan dalam pengiriman barang, yang pada gilirannya dapat mengurangi biaya produksi dan harga jual produk. Akibatnya, inflasi dapat ditekan karena harga barang konsumsi menjadi lebih stabil.

Membangun kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta untuk membiayai,

3. mengelola, dan mengoperasikan proyek transportasi. Kemitraan ini dapat membantu mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi yang dibutuhkan untuk mengatasi keterbatasan anggaran publik
4. Kesenjangan informasi atau asymmetric information antar pelaku di tengah panjangnya rantai distribusi menyebabkan tidak efisiennya harga di pasar hal ini dapat diatasi dengan cara
5. Meningkatkan transparansi pasar dengan mewajibkan pelaporan harga secara terbuka dan transparan. Ini perlu dilakukan melalui platform perdagangan yang terbuka dan mudah diakses oleh semua pihak.
6. Menggunakan teknologi informasi untuk menyebarkan informasi harga secara lebih efisien dan cepat di antara para pelaku pasar. Ini termasuk penggunaan sistem perdagangan elektronik, algoritma perdagangan, dan platform perdagangan online

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Memanfaatkan APBD untuk pengendalian inflasi melalui intervensi pasar untuk mengurangi gejolak harga komoditas pangan terutama beras, dan penguatan cadangan pangan daerah termasuk pengaturan pengeluarannya
2. Pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah perlu meningkatkan pengawasan harga barang-barang pokok dan kebutuhan penting lainnya. Ini termasuk pemantauan aktif terhadap praktik harga yang tidak wajar atau spekulatif, serta penindakan terhadap pelanggaran yang ditemukan.
3. Memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan seperti kredit usaha kecil dan menengah (UKM) atau mikro, serta asuransi pertanian, dapat membantu meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko ekonomi dan mengurangi tekanan inflasi.
4. Publikasi harga data komoditas pokok secara periodik di media massa atau media lain yang mudah diakses Masyarakat
5. Melakukan pengumpulan Data Pengolahan Informasi Pasar (PIP) Komoditi Peternakan.
5. Pembentukan database surplus / defisit komoditas pangan strategis (Cabe dan Bawang Merah)
6. Memperkuat sarana dan prasarana pertanian dalam rangka meningkatkan produktifitas pertanian
7. Mengintegrasikan stok dan neraca pangan daerah untuk penyusunan kebijakan pengendalian inflasi terutama untuk memperkuat kerjasama antar daerah
8. Memperkuat infrastruktur dan rantai pasok untuk memperlancar distribusi barang dan jasa
9. Memperkuat komunikasi dan sinergi koordinasi kebijakan pengendalian inflasi untuk menjaga ekspektasi inflasi
10. Memperluas kerjasama antar daerah (KAD) terutama untuk daerah surplus/defisit dalam menjaga ketersediaan suplai komoditas
11. Rekomendasi Berdasarkan 4K yakni menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif

1	KETERJANGKAUAN HARGA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Operasi Pasar Murah/Gerakan Pangan Murah 2. Pembinaan terhadap pengelolaan sarana distribusi perdagangan 3. Informasi Neraca Bahan Pangan dan Makan 4. Penyediaan Pangan berbasis sumber daya Pangan Lokal 5. Pemantauan Panel harga Pangan di tingkat Pedagang 6. Subsidi harga barang 7.
2	KETERSEDIAAN PASOKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan dan Pengelolaan Cadangan Pangan pada Daerah Rawan Pangan 2. Pembinaan Kelompok Pertanian 3. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan 4. Peningkatan Pengolahan Pangan (Pangan Lokal)
3	KELANCARAN DISTRIBUSI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Prasarana Perhubungan 2. Rehabilitasi Jalan 3. Pemeliharaan Berkala Jalan 4. Pemeliharaan Rutin Jalan 5. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
4	KOMUNIKASI EFEKTIF	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Koordinasi Seluruh Anggota TPID 2. Penguatan Informasi Perkembangan Harga